

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Teori yang diperlukan untuk mendukung penelitian dalam memahami setiap variable yaitu Akuntansi Sektor Publik, Kualitas Laporan keuangan dan Akuntabilitas Publik berikut teori dari ke tiga variabel sebagai berikut

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2018:3). mengemukakan Akuntansi sektor publik merupakan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan organisasi ataupun entitas publik lainnya contohnya seperti pemerintah, LSM, dan lainnya

Adapun pengertian Menurut Indra Bastian (2014:6) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat.

Mardiasmo (2009:2) Menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik.

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan keuangan yang diterapkan di lembaga-lembaga tinggi negara dan

departemen-departemen dibawahnya untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Kajian tentang organisasi sektor publik biasanya mulai dilakukan dari sisi manajemen. Pemahaman sektor publik lebih ditempatkan pada suatu wilayah di luar pemerintahan ditambah dengan wilayah pemerintahan itu sendiri. Berikut karakteristik organisasi sektor publik:

Menurut Indra Bastian (2010:11) karakteristik organisasi sektor publik adalah:

Tabel 2. 1
Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Tujuan	Untuk menyejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani
Aktifitas	Pelayanan publik (<i>public services</i>). seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan
Sumber Pembiayaan	Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lainnya dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
Pola Pertanggungjawaban	Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, seperti dalam organisasi pemerintah yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam yayasan dan LSM seperti dewan pengampu.
Kultur Organisasi	Bersifat birokratis, formal dan berjenjang
Penyusunan Anggaran	Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan anggaran program publik dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRD, majelis Syuro partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan .
<i>Stakeholder</i>	Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga internasional termasuk lembaga Donor Internasional (seperti Bank Dunia (<i>World Bank Monetary Fund</i> (IMF), <i>Asian Development Bank</i>), <i>International</i> (ADB), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), <i>United Nation Development Program</i> (UNDP), USAID, dan pemerintah luar negeri

2.1.1.3 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta menurut Indra Bastian (2010:60):

Tabel 2. 2
Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Perbedaan	Akuntansi Sektor Publik	Akuntansi Sektor Swasta
Tujuan	Kesejahteraan Masyarakat	Keuntungan
Organisasi	Sektor Publik	Swasta
Keuangan	Negara, Daerah, Masyarakat, Konsumen	Individual, Perkumpulan

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda. Sektor swasta bertujuan untuk memaksimalkan laba sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik. Organisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat sedangkan organisasi swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham atau kreditor.

2.1.1.4 Indikator Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagianbagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

a. Perencanaan Publik;

Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada

b. Penganggaran Publik;

Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Realisasi Anggaran;

Realisasi anggaran terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.

e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik;

Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

f. Audit Sektor Publik;

Audit adalah suatu proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

g. Pertanggungjawaban Publik.”

Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya.”

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015 Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan Informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya. informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (PSAK 2015:2)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2) laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.

Pengertian Laporan Keuangan yang dikemukakan Menurut Kasmir (2018:7) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Adapun pengertian Laporan Keuangan lainnya yang dikemukakan oleh Fahmi (2016:21) adalah sebagai berikut :

“Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

2.1.2.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Sari, Novitasari, dan Widhiastuti (2021:233) Kualitas Laporan Keuangan adalah :

“Hasil relaksasi dari sekian banyak transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan dimana transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan dan diringkaskan dalam satuan uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan kemampuan.”

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:8) Kualitas laporan keuangan adalah

“Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki “

Adapun menurut Fahmi dalam Sri Nurul Fajri (2013:4) mengemukakan kualitas laporan keuangan adalah laporan berstruktur mengenal laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan

Sedangkan menurut Mahmudi (2013:143) Kualitas laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan”.

2.1.2.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Indikator Laporan Keuangan yang berkualitas dijelaskan oleh Jumingan (2014:5) yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a) Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki Manfaat Predikatif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Akuntabilitas Publik

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Definisi akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti (2014:2) adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.”

Menurut Abdul Halim (2012:20) definisi akuntabilitas publik sebagai berikut :

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.”

menurut Indra Bastian (2010:88) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

“Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja merupakan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan atas semua aktivitas yang dilakukan”.

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:9) pengertian akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut Undang-Undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik

2.1.3.2 Tipe-Tipe Akuntabilitas Publik.

Tipe Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya dibagi menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42) yaitu :

1. Akuntabilitas Internal
2. Akuntabilitas Eksternal

Berikut ini penjelasan dari beberapa macam tipe akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Internal Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/keompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas Eksternal Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Akuntabilitas juga dibedakan menjadi beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono (2007:50) mengemukakan ada lima perspektif akuntabilitas, yaitu :

- a. Akuntabilitas Administratif/organisasi Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.
- b. Akuntabilitas Legal Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh

pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Akuntabilitas Politik Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber
- d. Akuntabilitas Profesional Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.
- e. Akuntabilitas Moral atau Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas Publik

Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut (Hopwood dan Tomkins,1984; Elwood, 1993) dalam Mahmudi (2013:9) sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

Sedangkan menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21–22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi.
3. Akuntabilitas Program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik

Kewajiban sektor publik dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (Acoountability).Hasanah dan Fauzi (2017:2)

Berdasarkan penelitian Sherillia Dkk (2012). Menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas. Selain itu ada penelitian yang menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas yaitu penelitian Winda (2022),

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan dari peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik

2.2.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik

Menurut Mursyidi (2013:59) Untuk mengetahui posisi akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas atau instansi dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas

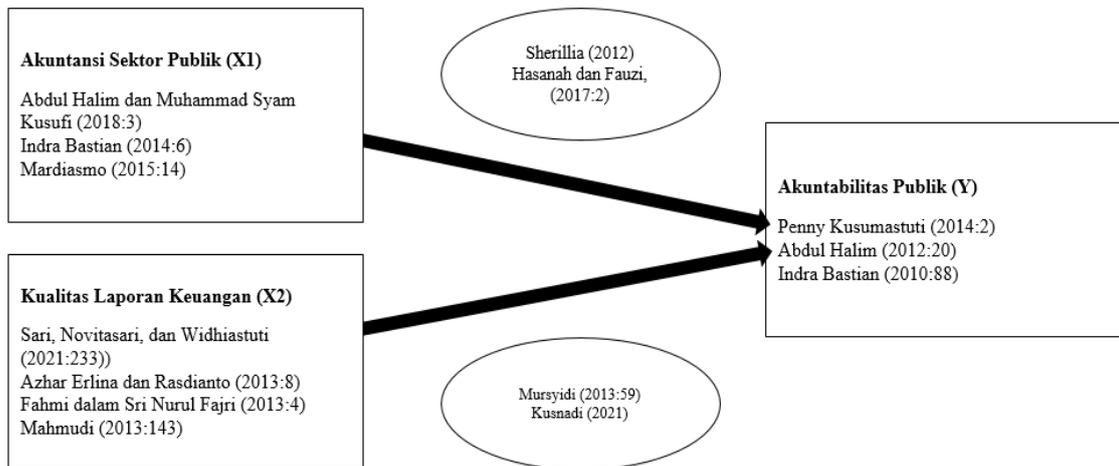
Berdasarkan penelitian Kusnadi dkk. menyatakan “*the quality of financial report gave the significant effect on accountability performance in religious court*

of Lubuk Linggau by $tcount > ttable$, $(15,517 > 1,692)$, significant value with $0,000 < 0,05$ and determinant coefficient is 0,749 or 74,9 percent.”

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nining Asniar Ridzal (2020) yang menyatakan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan dari peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyajikan paradigma penelitian dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:39) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik

H₂ : Terdapat pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik